

Hubungan Kemampuan Akses Masyarakat Terhadap Produk Hasil Hutan Produksi Dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

(Kasus Hutan Sanggabuana, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru,
Kabupaten Karawang)

The Relationship Of Community Access Capabilities To Production Forest Products With The Household Welfare Level

Dwi Desriyanti, Endriatmo Soetarto

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
Email: dwihyuga17@gmail.com; endriatmo1@gmail.com

ABSTRACT

Currently the status of Sanggabuana Forest is a limited production forest located in Mekarbuana Village, Tegalwaru District, Karawang Regency. Communities around the forest can obtain production forest products according to their access capabilities. It is suspected that the higher the ability of community access to production forest products, the higher the level of community household welfare. After conducting research using quantitative and qualitative methods through questionnaires, in-depth interviews and observation of related sources, the condition of the household welfare of the Mekarbuana Village community is quite even and there are no significant gaps. It can be said that there is no relationship between the ability of community access to production forest products and the level of community household welfare.

Keywords: Access, Production forests, Production forest products, Welfare.

ABSTRAK

Saat ini status Hutan Sanggabuana merupakan hutan produksi terbatas yang berada di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh hasil hutan produksi sesuai dengan kemampuan akses yang dimiliki, diduga semakin tinggi kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat. Setelah dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif melalui instrumen kuesioner, wawancara mendalam serta observasi sumber-sumber terkait, kondisi kesejahteraan rumah tangga masyarakat Desa Mekarbuana sudah cukup merata dan tidak didapati kesenjangan yang berarti. Dapat dikatakan tidak terdapat hubungan antara kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat.

Kata kunci: Akses, Hutan produksi, Kesejahteraan, Produk hasil hutan produksi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, kekayaan sumberdaya hutan, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektar.

Tujuh puluh lima persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan. Menyadari begitu melimpahnya kekayaan alam Indonesia, pemerintah dituntut untuk mampu mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tanpa merusak kekayaan alam itu sendiri. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai hak masyarakat dalam turut serta mengelola hutan yang berada di Indonesia, supaya masyarakat

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah juga terus bekerjasama dengan berbagai elemen, baik perhutani, swasta, maupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan hutan Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia dibagi atas: (1) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; (2) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; dan (3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.

Hutan Produksi terdiri atas :

a. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan tebang pilih maupun dengan tebang habis. Hutan Produksi Tetap dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil.

b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan alam produksi yang karena faktor topografi, kepekaan jenis tanah dan iklim sehingga pemanfaatan hasil hutan kayunya dibatasi berdasarkan limit diameter. Eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksploitasi yang dilakukan juga harus menerapkan teknik tebang pilih.

c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah status atau peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dengan cara pelepasan kawasan hutan atau dengan cara tukar menukar melalui keputusan menteri. Hutan Produksi sendiri merupakan kawasan hutan paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan konservasi dan hutan lindung. Luas hutan jenis ini di

Indonesia sendiri sebesar 72 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017). Sebagian besar hutan jenis ini yang berupa hutan alam atau hutan rimba tersebar merata di seluruh kawasan Pulau Kalimantan. Hutan Produksi yang berupa hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hutan jenis ini yang ada di Pulau Jawa berupa hutan jati, hutan pinus, hutan jabon, hutan sengon, hutan mahoni dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Sumatera dan Aceh berupa hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.

Pegunungan Sanggabuana adalah pegunungan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Karawang. Secara administratif pegunungan ini ada di Desa Mekarbuana, Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Pegunungan Sanggabuana memiliki panjang 21 km dan lebar 14 km, dengan luas 294 km². Pegunungan Sanggabuana memiliki ketinggian antara 269–1.279 MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut). Kemiringan Pegunungan Sanggabuana antara 10⁰-50⁰ dengan 151 alur air. Merupakan pegunungan tertinggi dan satu satunya di Karawang. Gunung Sanggabuana terletak di perbatasan empat kabupaten, adalah di sebelah utara yaitu Kabupaten Karawang, sebelah timur yaitu Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan yaitu Kabupaten Cianjur dan sebelah barat yaitu Kabupaten Bogor. Saat ini status kawasan hutan Pegunungan Sanggabuana masuk dalam kategori hutan produksi terbatas dan sedang diusulkan menjadi hutan lindung untuk mencegah meluasnya kerusakan hutan di wilayah tersebut. Pegunungan Sanggabuana ada dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Purwakarta.

Perkampungan masyarakat Sanggabuana rata-rata berada di lembahan dengan ketinggian 80–400 MDPL disepanjang aliran sungai yang hulunya ada di Pegunungan Sanggabuana. Contohnya adalah Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru, yang hidup masyarakatnya tergantung pada Pegunungan Sanggabuana. Ada yang bekerja sebagai petani, pemandu wisata dan wirausaha di wilayah Sanggabuana.

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitarnya menjadi hal yang sangat penting karena potensi keanekaragaman hayati dan dampaknya bagi

ekosistem lain serta menjadi penopang kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tentu tidak semua masyarakat serta merta dapat mengakses sumberdaya hutan tersebut, pasti ada aturan yang harus di patuhi dan batasan-batasan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan demi menjaga kelestarian dan keseimbangan hutan itu sendiri. Tidak juga semua hutan dapat dimanfaatkan sumberdayanya untuk pemenuhan kebutuhan manusia, bagi hutan kawasan lindung dan konservasi tidak dapat di akses bebas oleh masyarakat karena memang fungsinya untuk pelestarian alam. Berbeda dengan hutan produksi yang memang produk hasil hutannya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini juga untuk menggali lebih dalam lagi mengenai hubungan antara akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi dengan kesejahteraan rumah tangga. Mengingat betapa pentingnya peranan hutan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat. Maka masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat yang memiliki akses terhadap Hutan Produksi. Penelitian ini dikemas dalam judul: **Akses terhadap Produk Hasil Hutan Produksi dan Kesejahteraan Rumah Tangga.**

Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang memiliki akses terhadap produk hasil hutan produksi?
3. Bagaimana hubungan kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga?

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hubungan kemampuan akses dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Desa Mekarbuana, dan secara khusus yang

menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Menjelaskan bagaimana kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi.
2. Menjelaskan bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga yang memiliki akses terhadap produk hasil hutan produksi.
3. Menganalisis hubungan kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

PENDEKATAN TEORITIS

Definisi Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dijelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Produksi terdiri atas : (1) Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan tebang pilih maupun dengan tebang habis. Hutan Produksi Tetap dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil; (2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan alam produksi yang karena faktor topografi, kepekaan jenis tanah dan iklim sehingga pemanfaatan hasil hutan kayunya dibatasi berdasarkan limit diameter. Eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksploitasi yang dilakukan juga harus menerapkan teknik tebang pilih; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah status atau peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dengan cara pelepasan kawasan hutan atau dengan cara tukar menukar melalui keputusan menteri.

Produk Hasil Hutan Produksi

Seperti namanya, hutan produksi memiliki fungsi pokok sebagai penghasil produk hutan (hasil hutan). Berikut ini hasil hutan yang dihasilkan oleh hutan yang memiliki fungsi utama untuk produksi:

1. Kayu : Kayu merupakan hasil hutan produksi yang paling dominan dibandingkan jenis hasil hutan lainnya. Kayu yang berasal dari hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas dalam bentuk *pulp* kayu, bahan baku bangunan dan lain sebagainya. Jenis-jenis kayu yang dihasilkan dari hutan produksi tentunya termasuk ke dalam jenis kayu komersial dan tidak termasuk ke dalam kategori langka. Jenis kayu hasil dari hutan produksi meliputi kayu jati, kayu jabon, kayu sengon, kayu meranti, kayu pinus, kayu eboni, kayu mahoni, kayu akasia, dan lain sebagainya.

2. Hasil hutan non kayu : Selain hasil hutan kayu, hutan yang memiliki fungsi utama produksi juga menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau sering disebut Hasil Hutan Non Kayu (HHNK). Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi produk hasil hutan andalan. Jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) meliputi rotan, getah damar (kopal), getah pinus (resin), bambu, buah-buahan, sagu, madu, nipah, dan lain sebagainya.

3. Pemanfaatan kawasan yang dapat berupa : (a) Budidaya tanaman obat; (b) Budidaya tanaman hias; (c) Budidaya janur; (d) Budidaya lebah; (e) Budidaya ulat sutera; (f) Penangkaran satwa; (g) Budidaya sarang burung walet; dan (h) Budidaya hijauan makanan ternak.

4. Pemanfaatan jasa lingkungan : Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan di areal Hutan Produksi meliputi: (a) Pemanfaatan aliran air; (b) Pemanfaatan air; (c) Wisata alam; (d) Perlindungan keanekaragaman hayati;

(e) Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
(f) Penyerapan dan atau penyimpan karbon.

Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13.

Hasil hutan tersebut dapat berupa: (1) hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan; (2) hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya; (3) benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;

(4) jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain; (5) hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara, tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-undang ini.

Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012), diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya baik dalam kebutuhan sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik untuk meningkatkan taraf hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah Satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan. Biro

Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) Tingkat pendapatan keluarga; (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (3) Tingkat pendidikan keluarga; (4) Tingkat kesehatan keluarga; (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Konsep Kesejahteraan

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut : (1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama ; (2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga ; (3) keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusus di samping kebutuhan pokok. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu ; (1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. (3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Berdasarkan pernyataan BPS (2018), kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kepribadian masyarakat dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal dan lingkungannya. Karena peranan tempat tinggal sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya di Indonesia, negara menjamin dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman masyarakatnya.

Rumah Layak Huni

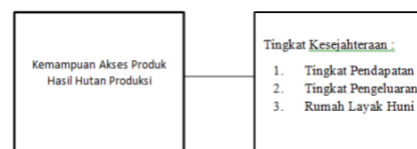
Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah yang memenuhi syarat), kecukupan minimum luas tempat tinggal (luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²), memiliki sumber penerangan utama listrik, memiliki akses air minum yang layak, dan memiliki akses sanitasi yang layak. Rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua kriteria yang tidak terpenuhi dari tujuh indikator pembentuk.

Akses

Akses menurut Ribot dan Peluso (2003) adalah: (1) Kemampuan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda (*the ability to derive benefit from things*); (2) Akses dalam pengertian Peluso lebih ditekankan pada “sekumpulan kuasa” (*a bundle of power*) Akses menurut pengertian klasik ekonomi (Ostrom): (a) Hak untuk memperoleh manfaat dari suatu benda (*the right to benefit from things*); (b) Akses dalam pengertian klasik ekonomi adalah “sekumpulan hak” (*a bundle of rights*).

Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitarnya menjadi hal yang sangat penting karena potensi keanekaragaman hayati dan dampaknya bagi ekosistem lain serta menjadi penopang kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tentu tidak semua masyarakat serta merta dapat mengakses sumberdaya hutan tersebut, pasti ada aturan yang harus di patuhi dan batasan-batasan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan demi menjaga kelestarian dan keseimbangan hutan itu sendiri. Hubungan Kemampuan Akses Masyarakat terhadap Produk Hasil Hutan Produksi dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga tersedia pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang muncul adalah “Terdapat hubungan signifikan antara kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan produksi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga”.

PENDEKATAN LAPANG

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial atau fakta suatu peristiwa di daerah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif dengan didukung data kualitatif. Pengaruh tingkat akses terhadap tingkat kesejahteraan diukur secara kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dalam mengumpulkan data. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menambah dan memperkuat informasi yang telah didapatkan pada data kuantitatif. Pengambilan data secara kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terkait. Hasil wawancara mendalam digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan pertanyaan dalam kuesioner. Pandangan subyektif-kualitatif informan kemudian dibandingkan dengan hasil analisis obyektif-kuantitatif responden, sehingga didapatkan informasi dengan analisis dan interpretasi yang lebih rinci dan mendalam.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan bahwa Pegunungan Sanggabuana terletak di desa tersebut sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses hutan dengan mudah. Masyarakat setempat juga telah memanfaatkan sumberdaya hutan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan yaitu sejak bulan Agustus sampai November 2019. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan

proposal skripsi, kolokium, perbaikan proposal penelitian, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung di lapang dengan cara wawancara menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan informasi tertulis yang dapat digunakan dan sesuai dengan topik penelitian.

Teknik Penentuan Informan dan Responden

Pemilihan responden sebanyak 30 orang dilakukan melalui metode pengambilan sampel *accidental sampling*, yakni cara mengambil atau menentukan sampel dari anggota populasi didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Di lapangan, teknik *accidental sampling* dilakukan dengan pendampingan dari Ketua RT setempat. Penentuan informan dalam wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) yakni mengetahui satu nama informan dan dari informan tersebut kemudian diketahui nama informan-informan yang lain.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS*. Pembuatan tabel frekuensi, grafik, diagram, serta tabel tabulasi silang untuk melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010*. Kemudian *SPSS version 23.0* digunakan untuk membantu dalam uji statistik yang akan menggunakan uji *pearson chi-square*.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Profil Desa Mekarbuana

Desa Mekarbuana merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wilayah Desa Mekarbuana sebelah utara berbatasan dengan Desa Wargasetra, sebelah timur berbatasan

dengan Desa Cintelaksana, sebelah barat berbatasan dengan Kab. Bogor, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Cianjur.

Luas wilayah Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang terbagi menjadi dua bagian yaitu luas wilayah desa sebesar $2.675.000\text{km}^2$ dan luas wilayah hutan desa sebesar 667km^2 . Kondisi bentangan wilayah yang ada di Desa Mekarbuana tergolong wilayah dataran tinggi dikarenakan wilayahnya yang terletak di daerah gunung.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

1. Umur Responden

Tabel 1 Persentase responden berdasarkan umur

Umur	%
≤ 20	0
21-30	7
31-40	37
41-50	23
51-60	23
61-70	3
71-80	7
≥ 81	0
Jumlah	100

Dari Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Jumlah responden paling banyak berada pada kisaran umur antara 31-40 tahun dengan presentase sebesar 37% sedangkan jumlah responden paling sedikit berada pada kisaran umur antara 61-70 tahun dengan presentase sebesar 3%. Presentase yang sama ialah responden kelompok umur 41-50 dan kelompok umur 51-60 tahun yaitu masing-masing memiliki nilai 23%. Hal ini signifikan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap produk hasil hutan produksi sanggabuana didominasi oleh kelompok umur antara 31 sampai 40 lalu disusul oleh kelompok umur antara 41-60 tahun. Responden yang berada dalam umur ini umumnya adalah masyarakat yang termasuk dalam usia produktif, dikarenakan untuk mengakses produk hasil hutan

produksi memang membutuhkan tenaga yang cukup besar.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menurut Hungu (2007) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir.

Tabel 2 Persentase responden menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	%
Perempuan	17
Laki-laki	83
Jumlah	100

Berdasarkan Tabel 2 persentase jenis kelamin responden yang memiliki akses di dominasi oleh laki-laki yakni sebesar 83% sedangkan perempuan hanya sebesar 17%. Hal ini dikarenakan mayoritas pekerjaan di dalam hutan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang pernah diikuti oleh masyarakat Desa Mekarbuana yang dipilih sebagai responden sampai dengan waktu saat penelitian berlangsung. Tingkat pendidikan pada penelitian ini dibagi menjadi lima golongan berdasarkan dengan kondisi di lapangan yaitu Tidak Bersekolah, Tidak Lulus SD, Lulus SD/Sederajat, Tidak Lulus SMP/Sederajat, Lulus SMP/Sederajat.

Tabel 3 Persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan

Jenis Pekerjaan	%
Tidak bersekolah	7
SD tidak lulus	33
Lulus SD	47
SMP tidak lulus	0
Lulus SMP	13
Jumlah	100

Berdasarkan Tabel 3 Tingkat Pendidikan responden yang ada di Desa Mekarbuana masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan terakhir responden didominasi oleh responden yang tamat SD yaitu sebesar 47%. Responden yang tidak tamat SD sebesar 33%. Responden yang tamat SMP sebesar 13%. Selain itu ada persentase responden yang tidak mengenyam bangku pendidikan atau tidak

bersekolah juga terbilang cukup besar yakni sebesar 7%.

4. Tingkat Akses Masyarakat terhadap Produk Hasil Hutan Produksi

Tabel 4 Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap produk hasil hutan produksi

Tingkat Akses	%
Rendah	27
Sedang	60
Tinggi	13
Jumlah	100

Tingkat akses masyarakat yang memiliki akses pada produk hasil hutan produksi di Desa Mekarbuana relatif sedang atau sudah mulai merata meskipun persentase masyarakat yang memiliki akses rendah masih terbilang cukup banyak. Salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat adalah kepemilikan lahan. Masyarakat yang memiliki lahan sendiri dapat dibidang sangat sedikit, kebanyakan masyarakat yang memanfaatkan produk hutan produksi adalah buruh tani yang mengelola lahan milik orang lain atau hanya mengambil produk hutan yang tersedia. Masyarakat yang memiliki lahan sendiri kebanyakan berasal dari RT 02 yang letaknya memang paling dekat dengan hutan produksi sanggabuana.

5. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pendapatan Hasil Pemanfaatan Produk Hasil Hutan Produksi

Pendapatan yang akan diubah dalam bentuk persentase hanyalah pendapatan murni hasil dari memanfaatkan produk hasil hutan produksi tanpa pendapatan tambahan dari pekerjaan lain, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Persentase kategori pendapatan hasil pemanfaatan produk hasil hutan

Kategori Pendapatan	Jumlah	%
Rendah	20	66,6
Sedang	5	16,7
Tinggi	5	16,7
Jumlah	30	100,0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan yang dihasilkan dari produk hasil hutan produksi terbilang cukup rendah yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti harga jual produk hasil hutan yang rendah atau kepemilikan lahan yang masih tidak merata.

Pendapatan Total

Jumlah total pendapatan yang dihasilkan rumah tangga dalam sebulan baik dari hasil pemanfaatan produk hasil hutan produksi maupun di luar hasil pemanfaatan produk hasil hutan produksi dalam sebulan.

Tabel 6 Persentase kategori pendapatan total perbulan

Kategori Pendapatan	Jumlah	%
Rendah	16	53,3
Sedang	8	26,7
Tinggi	6	20,0
Jumlah	30	100,0

Bahkan setelah menambahkan pendapatan dari luar pemanfaatan produk hasil hutan produksi, persentase kategori pendapatan tidak banyak berubah. Rumah tangga dengan pendapatan rendah masih unggul dengan perubahan persentasi dari 66,6% menjadi 53,3%.

Pengeluaran Rumah Tangga

Data pengeluaran rumah tangga yang akan diolah adalah jumlah pengeluaran untuk sebulan, dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Persentase kategori pengeluaran perbulan

Kategori Pengeluaran	Jumlah	%
Rendah	23	76,7
Sedang	6	20,0
Tinggi	1	3,3
Jumlah	30	100,0

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 76,7% rumah tangga memiliki pengeluaran yang rendah karena kebutuhan pangan sudah tersedia dari alam. Mayoritas penduduk memanfaatkan produk hasil hutan produksi untuk kebutuhan

pangan setiap harinya, sehingga pengeluaran untuk pangan tidak terlalu besar.

Rumah Layak Huni (RLH)

Rumah layak huni atau RLH adalah kondisi rumah yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan BPS yaitu ketahanan bangunan, kecukupan minimum luas tempat tinggal ($\geq 7,2$ m²), memiliki sumber penerangan utama listrik, memiliki akses air minum yang layak, dan memiliki akses sanitasi yang layak. Rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua kriteria yang tidak terpenuhi dari tujuh indikator pembentuk.

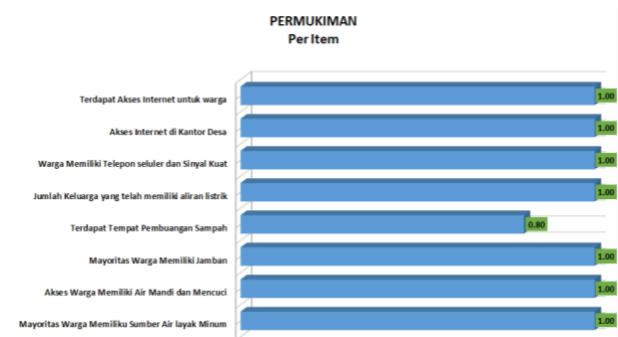
Tabel 8 Persentase RLH masyarakat Desa Sanggabuana

Kategori RLH	Jumlah	%
Rendah	0	0
Sedang	15	50
Tinggi	15	50
Jumlah	30	100

Setelah melakukan pengamatan, tidak terdapat kondisi rumah masyarakat Desa Mekarbuana yang tidak memenuhi syarat RLH. Meskipun memiliki katategori pendapatan rendah, namun kondisi rumah masyarakat tidak mencapai kondisi tidak layak. Bahan bangunan yang digunakan untuk dinding rumah selain tembok yaitu GRC (*Glassfibre Reinforced Cement*) atau sebuah produk pracetak dari beton yang dicampur dengan serat fiberglass sehingga lebih ringan dibanding tembok dan lebih tipis namun memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan tembok biasa. Selain kondisi dinding yang kokoh, kondisi atap rumah masyarakat juga terbilang sangat bagus karena menggunakan bahan genteng dan asbes yang memadai untuk memnuhi kriteria rumah layak huni.

Selain melihat bahan bangunan rumah, sumber air dan sumber listrik juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah sebuah rumah layak huni atau tidak. Masyarakat Desa Mekarbuana menggunakan sumber air yang

berasal langsung dari gunung sehingga memenuhi standar kelayakan air. Penyebaran listrik sendiri sudah merata dan tidak ada rumah masyarakat yang tidak mendapatkan akses listrik. Terpenuhinya semua syarat kondisi rumah layak huni membuat persentase rumah dengan kategori rendah menjadi 0% atau tidak dapat ditemukan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2 yang didapatkan dari data Desa Mekarbuana tahun 2019.



Gambar 2 Indikator pemukiman desa berdasarkan data Desa Mekarbuana 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dipastikan bahwa tidak terdapat rumah tidak layak huni di Desa Mekarbuana.

Hubungan Tingkat Akses Masyarakat terhadap Produk Hasil Hutan Produksi dengan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga

Tabel 9 Nilai Tabulasi Silang *Chi-Square* untuk Tingkat Akses dan Tingkat Pendapatan

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,502 ^a	4	,165
Likelihood Ratio	8,195	4	,085
Linear-by-Linear Association	1,822	1	,177
N of Valid Cases	30		

Berdasarkan Tabel 9 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* pada uji *Pearson Chi-Square* adalah sebesar 0,165. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* 0,165 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa “tidak ada ada hubungan antara

tingkat akses masyarakat terhadap produk hutan produksi dengan tingkat pendapatan rumah tangga”.

Hubungan Tingkat Akses Masyarakat terhadap Produk Hasil Hutan Produksi dengan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga

Tabel 10 Nilai Tabulasi Silang *Chi-Square* untuk Tingkat Akses dan Tingkat Pengeluaran

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,288 ^a	4	,511
Likelihood Ratio	3,196	4	,526
Linear-by-Linear Association	1,373	1	,241
N of Valid Cases	30		

Berdasarkan Tabel 10 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* pada uji *Pearson Chi-Square* adalah sebesar 0,511. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* $0,511 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa “tidak ada ada hubungan antara tingkat akses masyarakat terhadap produk hutan produksi dengan tingkat pengeluaran rumah tangga”.

Hubungan Tingkat Akses Masyarakat terhadap Produk Hasil Hutan Produksi dengan Tingkat Kelayakan Rumah

Tabel 11 Nilai Tabulasi Silang *Chi-Square* untuk Tingkat Akses dan Tingkat Kelayakan Rumah

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,889 ^a	2	,236
Likelihood Ratio	2,989	2	,224
Linear-by-Linear Association	1,349	1	,245
N of Valid Cases	30		

Berdasarkan Tabel 11 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* pada uji *Pearson Chi-Square* adalah sebesar 0,236. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* $0,236 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0

diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa “tidak ada ada hubungan antara tingkat akses masyarakat terhadap produk hutan produksi dengan tingkat kelayakan rumah”.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disertakan, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi terbilang cukup tinggi, dengan persentase 46,7% masyarakat yang memasuki wilayah hutan sebanyak lebih dari atau sama dengan 5 kali dalam seminggu. Masuknya masyarakat ke dalam wilayah hutan produksi tidak lain untuk memanfaatkan produk hasil hutan produksi yang berupa buah-buahan, mengelola sawah, dan produk lain seperti kopi dan madu. Meskipun persentase masyarakat yang memiliki akses atas produk hasil hutan cukup besar, namun tidak semuanya memiliki lahan sendiri. Kebanyakan dari mereka mengelola lahan milik orang lain atau mengambil produk hasil hutan produksi yang tersedia di alam tanpa melakukan budidaya sebelumnya.

2. Tingkat kesejahteraan rumah tangga terbagi menjadi tiga indikator yaitu, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan tingkat kelayakan rumah. Tingkat pendapatan rumah tangga tidak hanya dihasilkan dari mengakses produk hasil hutan produksi, sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan lain atau sampingan. Umumnya masyarakat bekerja sebagai tukang ojek pengunjung yang datang ke tempat wisata atau menjadi kuli bangunan. Meskipun begitu tingkat pendapatan masyarakat masih terbilang rendah. Tingkat pengeluaran masyarakat tidak mencapai angka yang tinggi dikarenakan sebagian besar kebutuhan pangan sudah bisa terpenuhi oleh produk hasil hutan produksi sehingga meskipun memiliki tingkat pendapatan yang rendah rumah tangga masih dapat meminimalisir jumlah pengeluaran agar tidak melebihi jumlah pendapatan. Tingkat kelayakan rumah di Desa Mekarbuana sudah cukup merata, tidak ditemukan adanya rumah yang tidak layak huni. Pembangunan yang merata dan memenuhi syarat kelayakan rumah dihasilkan dari budaya gotong royong yang masih melekat di Desa

Mekarbuana serta pemanfaatan dana desa yang terkontrol.

3. Setelah melalui uji hubungan tingkat akses masyarakat terhadap produk hasil hutan dengan tingkat pendapatan rumah tangga, ditemukan bahwa keduanya tidak berhubungan. Tidak juga terdapat hubungan antara tingkat akses masyarakat terhadap produk hasil hutan dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Tidak terdapat hubungan antara tingkat akses masyarakat pada produk hasil hutan terhadap tingkat kelayakan rumah huni. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat akses masyarakat terhadap produk hasil hutan produksi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Saran

Setelah memberikan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran dengan tujuan dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan Desa Mekarbuana khususnya mengenai pengelolaan hutan produksi Sanggabuana yang memiliki potensi tinggi, yaitu sebagai berikut: (1) Pengelola dapat memperkuat lagi aturan untuk akses wilayah hutan produksi sanggabuana, dikarenakan akses bebas yang selama ini dilakukan mengakibatkan sebagian wilayah hutan menjadi rusak; (2) Selain mengambil hasil hutan tanpa budidaya, sebaiknya masyarakat mulai melakukan budidaya dan tidak hanya menunggu hasil alam agar dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menghindari rusaknya semua wilayah hutan jika berpindah-pindah lokasi pengambilan produk hasil hutan; dan (3) Saran untuk penelitian selanjutnya jika ingin mengkaji mengenai Hutan Sanggabuana sebaiknya menggali lebih jauh mengenai tata aturan yang seharusnya diberlakukan dan bagaimana penerapannya di lapangan serta dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Jika aturan tidak berhasil diterapkan, teliti penyebab tidak keberhasilan tersebut.

Tidak banyak saran yang dapat saya berikan kepada pihak pengelola maupun masyarakat Desa Mekarbuana dikarenakan pengelolaan desa yang sudah merata dan terkontrol. Semoga dengan adanya penelitian ini, padat ditingkatkan lagi perhatian dan aturan untuk menjaga kualitas

hutan agar tidak menurun dan kehilangan sumberdayanya

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2000. Indikator Kesejahteraan. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta (ID): BPS.
- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2007. Indikator Kesejahteraan. Jakarta (ID): BKKBN.
- [FORKADASC+] Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum. 2014. Benteng Karawang Selatan Benteng Kabupaten Karawang. Karawang (ID): FORKADASC+.
- Apriani I, Meridian A.H, Nanggara S.G, Purba C, Ratriyono M, Rosalina L, Sari N.A. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013* [Internet]. [Waktu dan tempat pertemuan tidak diketahui]. Bogor (ID): Forest Watch Indonesia. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf.
- Fahrudin, A. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Atif N, editor. Bandung (ID): PT Refika Aditama.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., & Hidayat, A. (2015). Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 123–138.
- Fennell, L.A. (2011). Ostrom's law: Property rights in the commons. *International Journal of the Commons*, 5(1), 9–27.
- Ferdaus RM, Iswari P, Kristianto ED, Muhajir M, Diantoro TD, Septivianto S. 2014. Rekonfigurasi Hutan Jawa: Sebuah Peta Jalan Usulan CSO [Internet]. Yogyakarta (ID): Biro Penerbitan AruPA. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: <http://arupa.or.id/sources/uploads/2017/0>

- 5/REKONFIGURASI-HUTAN-JAWA-final-pdf4.pdf.
- Helmi F. 2010. Kontestasi Penguasaan Sumber Daya Hutan di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Desa Jamur Koenyel, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Tersedia pada : <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/60057/1/I10fhe.pdf>.
- Hermawan Y. 2010. Identifikasi Potensi dan Masalah di Kawasan Wisata Karawang Selatan Berdasarkan Aspek Atraksi Amenitas dan Aksesibilitas [Skripsi]. Bandung (ID): Universitas Komputer Indonesia. Tersedia pada : <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-yogahermaw-37395>.
- Karsudi, Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010). Model pengembangan kelembagaan pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tanaman*, XVI(2), 92–100.
- Kementerian Kehutanan. 2011. Kehutanan Indonesia [Internet]. Jakarta (ID): Pusat Humas Kementerian Kehutanan. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: <https://www.forclime.org/documents/Books/Forestry%20Indonesian.pdf>.
- Ministry of Forestry. (2008). *Reducing emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia*. Bogor: FORDA.
- Napitu JP, Hidayat A, Basuni S, Sjaf S. 2017. Mekanisme Akses pada Hak Kepemilikan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 14(2):101-118. [Internet]. [diunduh 2019 Maret 26]. Tersedia pada: <https://ejournal.fordamof.org/ejournal->
litbang/index.php/JPSEK/issue/download/543/pdf_27.
- Nugroho BTA, Undaharta NKE, Siregar M. 2008. Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Hutan Alami Bedugul-Pancasari, Bali. *Jurnal Biodiversitas*. 9(3):227-231. doi: 10.13057/biodiv/d090316. [Internet]. [diunduh 2019 Maret 26]. Tersedia pada: <https://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/D/D0903/D090316.pdf>.
- Priyatna, F.N. & Kinseng, R.A., & Satria, A. (2013). Akses dan strategi aktor-aktor dalam pemanfaatan sumber daya Waduk Djuanda. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 1–9.
- Quizon A.B. (2013). *Land governance in Asia: Understanding the debates on land tenure rights and land reforms in the Asian context*.
- Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara RI Tahun 1960 [Internet]. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920>.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 [Internet]. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: <https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-41-1999-kehutanan.pdf>.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. *A Theory of Acces. Rural Sociology* 68(2), 2003, pp. 153–181.

- Risnandar C. 2017. *Hutan Produksi*. Ensiklopedi Jurnal Bumi [Internet]. Waktu pembaharuan 2018 Maret 17. [diunduh 2019 Maret 29]. Tersedia pada: <https://jurnalbumi.com/knol/hutan-produksi/>.
- Singarimbun M, Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3S.
- Senoaji G. 2011. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*. 13(1):1-17. [Internet]. [diunduh 2019 Maret 26]. Tersedia pada: <https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/5458/2820>.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung (ID): PT Refika Aditama.